

Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar

Masdin, Abdul Hafiz

Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

email: masdindian9@gmail.com

ABSTRACT

The Sekolah Penggerak is a school that focuses on developing student learning outcomes holistically by realizing the profile of Pancasila Students which includes competencies and characters that begin with superior human resources (principals and teachers). This study aims to determine the Implementation of the Driving School Program in Merdeka Belajar Education Policy. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. While the data analysis technique uses an interactive model, namely data reduction, data presentation, discussion and conclusions. The result of the research is that the implementation of driving schools in elementary schools in Montong Gading sub-district, East Lombok, is carried out in accordance with the 5 interventions programmed by the government. The implementation process of these schools has similarities, namely in consultative and asymmetrical assistance programs, strengthening school human resources and data-based planning. In addition, each school also has different programs related to the new paradigm teaching intervention and school digitalization, because schools can create programs according to the needs of human resources and consider the needs of students.

Keywords: *Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak*

ABSTRAK

Sekolah Penggerak merupakan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, sajian data, pembahasan dan kesimpulan. Hasil penelitian adalah bahwa implementasi sekolah penggerak di Sekolah Dasar Kecamatan Montong Gading Lombok Timur dilaksanakan sesuai dengan 5 intervensi yang diprogramkan oleh pemerintah. Proses pelaksanaan dari sekolah-sekolah tersebut memiliki persamaan yaitu pada program pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah dan perencanaan berbasis data. Disamping itu, setiap sekolah juga memiliki program yang berbeda terkait intervensi pembelajaran paradigma baru dan digitalisasi sekolah, karena sekolah dapat membuat program sesuai dengan kebutuhan SDM dan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

Kata kunci: Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak		
First Received: 1 April 2024	Revised: 8 April 2024	Accepted: 27 Mei 2024
Final Proof Received: 17 Juni 2024	Published: 30 Juni 2024	
How to cite (in APA style): Masdin, & Hafiz A.. (2024). Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar. <i>Schemata</i> , 13(1), 43-56.		

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebuah ihtiar untuk mengubah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas hingga indonesia menjadi negara yang maju. Proses pelaksanaannya dibutuhkan kebijakan pendidikan sebagai landasan untuk menyeragamkan mutu pendidikan di indonesia visi dari pendidikan di indonesia adalah untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian malalui terciptanya pelajar pancasila yang bernalar kritis, kreatif mandiri, beriman bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkhebinekaan global.

Pendidikan di Indonesia juga masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Masih banyak sektor yang belum merata seperti tersedianya fasilitator pendidikan yaitu sekolah dan guru. Situasi yang terjadi sekarang bahwa sekolah hanya sebagai tugas dan seorang kepala sekolah hanya mengatur serta lebih banyak pada bersifat administratif. Guru di sekolah lebih ditekankan pada pelaksana kurikulum bukan pemilik dan pembuat kurikulum, guru hanya satu satunya sumber pengetahuan bukan sebagai fasilitator dan sumber pengetahuan, pembelajarannya hanya terpusat pada pengetahuan dan menggunakan pendekatan bermain dan calistung saja.

Maret 2020 sudah ada 4 kebijakan belajar yang diluncurkan Mendikbud yang disebut dengan Merdeka Belajar episode 1 hingga episode 4, kebijakan ini dinamakan program organisasi penggerak yang memiliki 4 pokok kebijakan, yaitu: (1) mendorong hadirnya ribuan Sekolah Penggerak, (2) sasaran program hingga 2022 untuk 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD dan SMP (sederajat), (3) diberikan pada organisasi penggerak dengan kategori tertentu berdasarkan rekam jejak organisasi, (4) monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan dan program sesuai (Kemendikbud, 2020)

Adapun salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar tersebut adalah Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul yaitu kepala sekolah dan guru (Kemendikbud, 2021b).

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak, mengatur tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah

penggerak, yaitu berisi diktum kesatu menyatakan bahwa menetapkan program Sekolah Penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil Pelajar Pancasila. Diktum ketiga, program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui a) sosialisasi program, b) penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara program Sekolah Penggerak, c) penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak, d) pelaksana kegiatan program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, e) pelaksana kegiatan program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan, dan f) evaluasi penyelenggaraan program Sekolah Penggerak. Diktum kelima menyatakan bahwa semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan Menteri ini dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan Program Sekolah Penggerak (PSP) sebagai model satuan pendidikan bermutu merupakan program Kementerian Pendidikan, 6 Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diperbarui disesuaikan kebutuhan pembaruan pembelajaran berdasarkan surat mkeputusan (SK) Menteri nomor 162/M/2021

Masalah yang sering kali dihadapi oleh sekolah dasar di Kota Bima adalah kurangnya motivasi dan hasil belajar siswa, kurangnya dukungan orang tua, kolaborasi dengan pemangku kepentingan kurang optimal, sekolah tidak memiliki program yang dapat meningkatkan pengetahuan, masalah keterampilan dan karakter siswa, guru-guru kurang aktif mengikuti program pengembangan diri, serta sekolah lebih banyak mengikuti administrasi pendidikan atau berbagai macam proses pendidikan tapi tidak fokus pada output pembelajaran (Wawancara Ibu Maryani 05 Maret 2022).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (N. Harahap, 2020, hal. 96). Sedangkan deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian deskriptif tidak mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada, karena penelitian deskriptif tidak maksudkan untuk menarik generasi yang menyebabkan suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial terjadi demikian (Rusmini, 2017, hal. 65).

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2017, hal. 231)

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Sidiq dkk., 2019, hal. 73). Studi dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh data tentang dokumentasi kegiatan-kegiatan, rekaman, foto-foto atau gambar, tulisan dan arsip yang berhubungan dengan implementasi program Sekolah Penggerak.

PEMBAHASAN

A. kebijakan pendidikan

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan berasal dari dua kata yaitu kebijakan dan pendidikan. Istilah kebijakan (policy) sering kali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepahaman, dan rencana strategis lainnya. Beragam pandangan tentang istilah kebijakan, Stephen J. Ball menyatakan *policy as text and discourse* yang menarik untuk dielaborasi. Ditelusuri lebih mendalam, kebijakan (policy) dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai: 1) *plan of action, esp. one made by government, business company, etc*; 2). *wise, sensible conduct* (Arwildayanto dkk., 2018, hal. 2)

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang RI, 2003).

2. Tujuan kebijakan pendidikan

Ilmuwan berupaya menjelaskan apa yang mereka lihat, menemukan aturan-aturan dan memformulasikannya menjadi teori. Kajian tentang ilmu kebijakan atau kebijakan publik bertujuan untuk membantu pemerintah dalam tugastugas pengembangan kebijakan. Tujuan utama dari ilmu kebijakan adalah untuk menentukan secara teknis serangkaian kegiatan yang terbaik untuk diadopsi agar dapat mengimplementasikan keputusan dan mencapai tujuan. Terbentuknya rancangan kebijakan diperlukan rumusan kebijakan dalam pendidikan guna terarahnya pandangan-pandangan yang sesuai dengan tujuan kebijakan

Kompri (2017, hal. 4) menuliskan empat tujuan kebijakan publik, yakni:

- a. Untuk mendistribusikan (alokatif dan redistributif) serta untuk mengabsorbsi.
- b. Untuk meregulasi dan meliberasi.

- c. Untuk menstabilkan dan untuk membuat dinamika.
- d. Untuk memperkuat negara dan memperkuat pasar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan pendidikan adalah harus menyentuh berbagai aspek yaitu harus dapat membentuk pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, menjadikan masyarakat demokratis, serta dapat menjadi modal bagi masyarakat dalam membangun dan memperkuat ekonomi pribadi maupun Negara.

3. Karakteristik kebijakan pendidikan

Majid (2018, hal. 13) menuliskan ada beberapa karakteristik kebijakan pendidikan meliputi:

- a. Memiliki tujuan pendidikan. karakter yang paling menonjol dari pada munculnya kebijakan pendidikan yaitu harus memiliki tujuan, khususnya kepada tujuan pada bidang pendidikan yang jelas dan terarah demi berkontribusi pada pendidikan.
- b. Memiliki aspek legal-formal. Berlakunya kebijakan pendidikan harus mendapatkan pengakuan dari wilayah jika telah melalui prosedur yang telah ditentukan, sehingga harus adanya pemenuhan atas pra-syarat yang dilalui terlebih dahulu. Sehingga kebijakan dapat memenuhi syarat konstitusional yang sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di setiap kebijakan tersebut. Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimate.
- c. Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan suatu panduan yang bersifat umum, maka harus memiliki manfaat agar dapat ditetapkan, agar tujuan pendidikan yang jelas, sehingga sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan memiliki karakteristik kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, khususnya kepada tujuan pada bidang pendidikan serta harus memiliki aspek legal forma manfaat sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai.

B. Merdeka Belajar

1. Pengertian Merdeka Belajar

Merdeka Belajar secara terminologi terdiri dari duakata yaitu merdeka dan belajar. Merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bebas, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu dan leluasa. Sedangkan belajar adalah proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan sehingga terjadi perubahan dalam diri seseorang. Sedangkan secara istilah Merdeka Belajar adalah ikhtiar yang tersistem untuk mewujudkan proses pembelajaran yang bebas, dalam artian siswa ataupun guru bebas dari tekanan, bebas dari hambatan dan bebas dari hal-hal yang membuat kegiatan

pembelajaran di sekolah tidak menyenangkan dan tidak bermakna (Suwanto, 2021, hal. 63)

Merdeka Belajar sebagai pengaplikasian kurikulum dalam proses pembelajaran haruslah menyenangkan, ditambah dengan pengembangan berpikir yang inovatif oleh para guru. Hal itu dapat menumbuhkan sikap positif murid dalam merespon pembelajaran. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar itu bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, dan bahagia untuk semua orang (Bayumie, 2020). Peserta didik tidak perlu dibebani dengan pencapaian skor atau nilai-nilai tertentu, karena setiap individu memiliki potensi, bakat dan kecerdasan masing-masing (Ulfa, 2021, hal. 126–127)

Merdeka Belajar merupakan proses pembelajaran secara alami untuk mencapai kemerdekaan. Diperlukan belajar merdeka terlebih dahulu karena bisa jadi masih ada hal-hal yang membelenggu rasa kemerdekaan, rasa belum merdeka dan ruang gerak yang sempit untuk merdeka. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi Pendidikan (Prayogo, 2020)

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Merdeka Belajar adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang membahagiakan dan secara alami dapat mencapai kemerdekaan belajar agar menghasilkan Output pendidikan dengan kualitas yang lebih baik.

2. Dasar Hukum Merdeka Belajar

Salah (2020, hal. 52) menuliskan beberapa dasar hukum yang menyertai upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia dilandasi tanggungjawab untuk menjalankan amanat yaitu:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV: dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Pasal 31, pada ayat 3, yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. UU Sisdiknas Tahun 2003; menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga

perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

- d. UU Sisdiknas tahun 2003, Pasal 3: menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab

3. Karakteristik Kurikulum Merdeka Belajar

Projek untuk menguatkan pencapaian profil Pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten pelajaran. Adapun (Amani, 2022) menuliskan konsep atau karakteristik utama dari kurikulum merdeka yang mendukung pemulihan pembelajaran sebagai berikut:

- a. Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil Pelajar Pancasila.
- b. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
- c. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal

Andika (2022) menuliskan bahwa terdapat 3 karakteristik kurikulum merdeka belajar yaitu:

- 1) Lebih fokus pada materi yang esensial. Dengan fokus pada materi yang esensial maka beban belajar di setiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit
- 2) Struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Kompetensi atau capaian pembelajaran di terapkan oleh kemendikbudristek tidak lagi untuk setiap tahun tetapi untuk setiap fase. Misalnya untuk SD kemendikbudristek menerapkan capaian fase A di akhir kelas 2, fase B di akhir kelas 4, dan fase C di akhir kelas 6
- 3) Tersedianya banyak perangkat ajar. Tersedia banyak alat bantu bagi guru untuk mengajar, seperti buku teks, modul ajar, asesmen literasi dan numerasi yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan belajar murid.

Dengan 3 karakteristik ini tentu akan membantu guru untuk merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid. Pembelajaran yang menumbuhkembangkan murid secara holistik, untuk menjadi pelajar Pancasila yang memiliki identitas ke Indonesiaan yang kuat dan siap menghadapi masa depan.

Dengan menerapkan kurikulum merdeka akan lebih relevan dan interaktif dimana pembelajaran berbasis proyek akan memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk secara aktif menggali isu-isu yang faktual. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih tiga pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pertama, menerapkan sebagian serta prinsip kurikulum merdeka dengan tidak mengganti kurikulum sekolah yang digunakan. Kedua, menggunakan kurikulum merdeka dengan memakai sarana pembelajaran yang sudah disiapkan. Ketiga, menggunakan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajar. Keunggulan dari adanya kurikulum merdeka pertama, lebih sederhana dan mendalam. Karena fokus pada materi yang penting dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kedua, lebih merdeka dimana peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Guru mengajar sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan siswa. Untuk mengembangkan kurikulum dan pembelajaran sesuai karakteristiknya sekolah mempunyai kekuatan (Rahayu dkk., 2022, hal. 6316).

C. Sekolah Penggerak

1. Pengertian Sekolah Penggerak

Sekolah Penggerak berasal dari dua kata yaitu sekolah dan penggerak. Secara bahasa menurut KBBI daring, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan penggerak adalah orang yang menggerakkan. Arti lainnya dari penggerak adalah alat untuk menggerakkan (Kemendikbud, 2022). Sedangkan menurut istilah, Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain (Kemendikbud, 2021c, hal. 2).

Sekolah Penggerak bukanlah sekolah unggulan, tidak mengubah input, tapi mengubah proses serta meningkatkan kapasitas SDM. Sasaran program ini ialah kepala sekolah dan guru pada tingkat satuan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB di 34 provinsi serta stakeholder pendidikan di tingkat daerah, beserta pengawas/penilik sekolah dan dinas pendidikan di daerah-daerah tersebut (Zamjani dkk., 2020, hal. 39). Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh tahap untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran melalui 4 tahapan pembelajaran (Program Sekolah Penggerak Kemendikbud, 2021b, hal. 6).

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Kemendikbud dalam (Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak pdf 2021a, hal. 4) memaparkan beberapa poin yaitu:

- a. Program kolaborasi antara kemendikbud dengan pemerintah daerah dimana komitmen pemda menjadi kunci utama.
- b. Intervensi dilakukan secara holistik mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah.
- c. Memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta.

Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri.

Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

2. Tujuan Sekolah Penggerak

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1177/M/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak menyebutkan bahwa tujuan Program Sekolah Penggerak adalah peningkatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil Pelajar Pancasila, menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, serta menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah maupun pusat (Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2020)

Memendikbud (2021 hal. 8-12) menuliskan dari tujuan pelaksanaannya, program sekolah penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan yaitu:

- a. **Pendampingan konsultatif dan asimetris:** program kemitraan antara kemendikbud dan pemerintah daerah dimana kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak. Program kemitraan antara kemendikbud dan pemerintah daerah dimana kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak. Kemendikbud melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemda provinsi dan kab/kota dalam perencanaan program Sekolah Penggerak. UPT kemdikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan pemda selama implementasi Sekolah Penggerak seperti fasilitasi pemda dalam sosialisasi

terhadap pihak yang dibutuhkan hingga mencari solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi.

- b. **Penguatan SDM sekolah:** Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh kemendikbud.
- c. **Pembelajaran dengan paradigma baru** adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.
- d. **Perencanaan berbasis data** adalah manajemen berbasis sekolah yang merupakan perencanaan berdasarkan refleksi dari satuan pendidikan
- e. **Digitalisasi sekolah** adalah penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkat efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customzed.

3. Ruang Lingkup Sekolah Penggerak

Ruang Lingkup Sekolah Penggerak Zamjani dkk., (2020, hal. 41) menuliskan secara umum ada lima aspek ruang lingkup program Sekolah Penggerak, yaitu:

- a. Pembelajaran. Sekolah akan menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru dengan model capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan holistik, serta dengan pendekatan differentiated learning dan Teaching at the Right Level (TaRL).
- b. Manajemen sekolah. Program Sekolah Penggerak juga menysasar peningkatan kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah menyelenggarakan manajemen sekolah yang berpihak kepada pembelajaran melalui pelatihan instructional leadership, pendampingan, dan konsultasi.
- c. Pemanfaatan teknologi digital. Program Sekolah Penggerak akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan kinerja kepala sekolah dan guru.
- d. Evaluasi diri dan perencanaan berbasis bukti. Program Sekolah Penggerak menyediakan data tentang hasil belajar siswa, serta pendampingan dalam memaknai dan memanfaatkan data tersebut untuk melakukan perencanaan program dan anggaran.

- e. Kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan konsultatif dan asimetris. Pada lingkup daerah, program Sekolah Penggerak juga akan meningkatkan kompetensi pengawas agar mampu mendampingi kepala sekolah dan guru dalam pengelolaan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

4. Kelebihan dan kekurangan sekolah penggerak

Kherysuryawan (2021) menuliskan kelebihan dari Sekolah Penggerak yaitu dapat dilihat dari manfaat yang didapatkan dari mengikuti program tersebut seperti:

- a. Manfaat untuk sekolah
 - 1) Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran
 - 2) Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru
 - 3) Percepatan digitalisasi sekolah
 - 4) Kesempatan untuk mejadi katalis perubahan bagi sekolah lain
 - 5) Percepatan pencapaian profil Pelajar Pancasila
 - 6) Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah
 - 7) Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru
- b. Manfaat untuk daerah
 - 1) Meningkatnya kompetensi SDM
 - 2) Membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan
 - 3) Efek multiplier dari Sekolah Penggerak ke sekolah lainnya
 - 4) Mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah
 - 5) Peluang mendapatkan penghargaan sebagai daerah penggerak pendidikan
 - 6) Menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan Sekolah Penggerak

KESIMPULAN

Implementasi program Sekolah Penggerak tidak terlepas dari 5 intervensi yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Secara umum penerapan 5 intervensi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan proses implementasi terletak pada program pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah dan perencanaan berbasis data. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pembelajaran paradigma baru yaitu pada kegiatan ekstrakurikuler dan budaya positif, dimana setiap sekolah mempunyai programnya masing-masing, begitupun dengan penggunaan media dalam digitalisasi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, N. K. (2022). *Mengenal Kurikulum Merdeka Belajar, Karakteristik Hingga Kriteria Umum*. liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5005662/mengenal kurikulum-merdeka-belajar-karakteristik-hingga-kriteria umum>
- Ardika, I. W. (2022). *Karakteristik Kurikulum Merdeka*. infoduniaedukasi.
<https://www.infoduniaedukasi.com/2022/03/karakteristik kurikulum-merdeka.html>
- Arwidayanto, Suking, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. CV. Cendekia Press.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing
- Kemendikbud. (2020). *Merdeka Belajar Episode*
http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/episode_4/web
- Kemendikbud. (2021a). *Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak*.
- Kemendikbud. (2022). *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggerak>
- Kherysuryawan. (2021). *Pengertian dan Manfaat Menjadi Sekolah Penggerak*.
<https://www.kherysuryawan.id/2021/11/pengertian-dan-manfaat-menjadi-sekolah.html?m=1>
- Majid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI)
- Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah penggerak (Nomor 1177/M/2020)*.
- Prayogo. (2020). *Peluang Reformasi Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid-19*.
<https://www.kalderanews.com/2020/05/peluang-reformasipendidikan-di-tengah-pandemi-covid-19-begini-katamendikbud/>
- Rahayu, R., Rosita, R., Sri, Y., Rahayuningsih, Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. Jurnal Basicedu, Vol 6*.
- Rusmini. (2017). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Saleh, M. (2020). *Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UNG*.
- Sidiq, U., Choiri, M. M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. CV. NataKarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suwantoro. (2021). Kesiapan Sekolah Dalam Menerapkan Kebijakan Merdeka Belajar di Masa Pandemi. In D. Adi Wijayanto (Ed.), *Waktunya Merdeka Belajar* (hal. 62). Akademia Pustaka.
- Ulfa, M. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Jarak Jauh. In *Waktunya Merdeka Belajar* (hal. 126–127). Akademia Pustaka.
- Undang-undang RI. (2003). Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Nomor 20 Tahun 2003).
- Zamjani, I., Aditomo, A., Pratiwi, I., Solihin, L., Hijriani, I., Utama, B., Anggraena, Y., Felicia, N., Simatupang, S. M., Djunaedi, F., Amani, N. Z., & Widiawati, D. (2020). *Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak*. Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

